



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

---

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke : 27 (dua puluh tujuh)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan : 1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);  
2. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;  
3. Direksi BPJS Kesehatan;  
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;  
5. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Kamis, 17 September 2020
- Pukul : 14.00 WIB – selesai
- Acara : 1. Penjelasan mengenai perumusan kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Standar termasuk redefinisi kelas kepesertaan dan manfaat layanan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);  
2. Penjelasan mengenai proyeksi defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2020;  
3. Penjelasan mengenai proses verifikasi dan pembayaran klaim biaya pelayanan *Covid-19*.
- Ketua Rapat : Dra. Sri Rahayu/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Peserta Rapat : A. 42 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN):

- Hadir dan Virtual
- Tubagus Achmad Choesni;
  - C. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan: dr. Chairul Radjab Nasution, M.Kes.;
  - D. Direktur Utama BPJS Kesehatan: Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.;
  - E. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI: drg. Oscar Primadi, MPH.;
  - F. Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI: Prof. Dr. H. Abdul Kadir, Ph.D. Sp.THT-KL(K), MARS.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dibuka pukul 14.10 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Mengingat penerapan kelas standar rawat inap JKN terkait langsung dengan Program Prioritas Nasional dan reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:
  - a. menyusun *grand design* persiapan implementasi kelas standar rawat inap JKN yang mencakup seluruh sarana prasarana rumah sakit dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
  - b. Menambahkan penghitungan kebutuhan anggaran Tahun 2021 untuk pemenuhan sarana prasarana rumah sakit.
2. Dalam penyusunan kebijakan penerapan manfaat JKN berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:
  - a. Memastikan pelaksanaan skema pembiayaan penyakit katastropik; dan
  - b. Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengedepankan standar kedokteran yang berlaku.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan segera menyelesaikan klaim rumah sakit untuk bayi baru lahir dengan tindakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam Pelaksanaan JKN, Surat Menteri Kesehatan Nomor JP.02.04/MENKES/602/2020 tertanggal 7 September 2020 tentang jawaban atas tanggapan surat BPJS Kesehatan tentang Penjaminan Klaim Bayi Baru Lahir dengan Tindakan dalam Penyelenggaraan Program JKN dan temuan BPKP RI (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), paling lambat 31 Oktober 2020.

4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada Rapat Dengar Pendapat hari ini untuk disampaikan kepada Komisi IX DPR RI paling lambat pada hari Rabu, 23 September 2020.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 19.25 WIB.

Jakarta, 17 September 2020

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

**Dra. SRI RAHAYU**  
**A-217**